

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Sampai saat ini konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah masih terus berlangsung, khususnya konflik yang telah berpuluh tahun lalu terjadi antara Palestina dan Israel. Kedua kawasan yang bertikai ini, belum mampu untuk menciptakan perdamaian abadi di wilayah yang mereka diami mengingat bahwa baik Israel maupun Palestina tetap berusaha untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing .

Berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh Palestina dan Israel selalu mengalami kegagalan. Hal tersebut mengharuskan Palestina dan Israel dihadapkan kembali pada kesepakatan-kesepakatan berikutnya yang diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi konflik Palestina dan Israel.

Peta Jalan Damai merupakan upaya damai berikutnya yang diharapkan mampu memberi jalan keluar bagi Palestina dan Israel untuk mengakhiri konflik di kawasan tempat mereka hidup.

Ketertarikan terhadap masalah Timur Tengah yang sampai saat ini masih terjebak dalam konflik yang tidak pernah berakhir antara Israel dan Palestina menjadi salah satu alasan penulis untuk memilih judul Skripsi “ **Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Palestina (PLO) Menerima Upaya Damai Melalui Konsep Peta Jalan Perdamaian (*Roadmap*) Israel-Palestina**”.

Memang telah banyak yang meneliti masalah Timur Tengah sejak lama, namun penulis berani untuk meneliti tentang faktor-faktor penyebab Palestina (PLO) mau menerima konsep Peta Jalan Damai, karena belum ada yang menulis tentang hal tersebut di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Perang Israel-Palestina merupakan konflik yang berkepanjangan (*protracted conflict*) yang hingga saat ini masih menjadi agenda bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Pada intinya konflik antara kedua bangsa tersebut timbul karena adanya klaim yang kuat dari bangsa Israel terhadap wilayah Palestina.

Israel menganggap bahwa wilayah Palestina yang di masa lampau dikenal dengan nama Kanaan adalah merupakan “*The Promised Land*” bagi kaum Israel. Berdasarkan klaim teologis dan historis terhadap Tanah Palestina dan dukungan dari Deklarasi Balfour 1917, maka bangsa Israel dalam hal ini warga Yahudi mulai menguasai Palestina. Palestina sendiri berusaha untuk tetap mempertahankan wilayah tempat tinggalnya dari kungkungan bangsa Yahudi.

Berbagai kesepakatan yang ditandatangani untuk perdamaian Israel-Palestina tidak membuahkan hasil yang memuaskan terutama bagi Palestina. Contohnya ialah ketika lahir Kesepakatan Oslo tahun 1993 yang ditandatangani oleh Ketua PLO Yasser Arafat dan PM Israel di Washington. Berbagai kekhawatiran dan pesimisme bermunculan setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo.¹ Implementasi Kesepakatan Oslo juga tidak menunjukkan titik terang yang

¹ *Kompas* 4 Mei 1999

pada akhirnya tidak banyak memberikan kontribusi bagi perdamaian Israel dan Palestina.

Tahun 1998, upaya untuk mendamaikan kedua bangsa di wilayah Timur Tengah ini kembali muncul melalui Perundingan Wye River I yang mengharuskan Israel untuk mundur dari 13,1 persen wilayah Tepi Barat dan membebaskan 750 tawanan Palestina. Sedangkan Palestina diharuskan memerangi kelompok militan anti Israel.²

Perkembangan proses perdamaian Timur Tengah antara Israel dan Palestina menjadi kian tidak menentu. Kesepakatan Wye River II di Sharm El Sheikh, Mesir pada 5 September 1999 sebagai revisi dari Wye River I dalam perkembangannya pun tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, bahkan mengalami kemacetan kembali dalam penerapannya.

Untuk melanjutkan kembali proses perdamaian antara Israel dan Palestina, Amerika Serikat mengambil inisiatif untuk mengadakan Pertemuan Segitiga di Camp David (KTT Camp David) yang dimaksudkan untuk mencari penyelesaian akhir masalah Palestina seperti soal status kota Yerusalem Timur, pengungsi Palestina, pemukiman Yahudi, serta perbatasan Israel-Palestina, namun lagi-lagi berujung pada kegagalan.

Begitu banyak perundingan dan kesepakatan yang dicapai untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah khususnya antara Israel dan Palestina, mulai dari Kesepakatan Oslo sampai dengan Kesepakatan Camp David. Namun, semuanya berujung pada satu titik yang sama yaitu kegagalan.

² *Kompas* 24 Oktober 1998

Namun seiring berjalannya waktu, proses perdamaian yang selalu diupayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Israel dan Palestina mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik dengan diajukannya konsep Peta Jalan menuju Perdamaian di Timur Tengah (*The Roadmap for Peace in the Middle East*) oleh kwartet internasional yang terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB.

Kwartet ini ingin mewujudkan perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina, mengingat setelah kegagalan Kesepakatan Camp David tahun 2000 lalu, tidak ada lagi upaya yang maksimal dari dunia internasional dalam menangani pertikaian dan konflik yang hampir tidak pernah berakhir di kedua wilayah di Timur Tengah ini. Bukan Israel jika tidak berbuat semena-mena terhadap Palestina. Entah sudah berapa banyak perjanjian dan kesepakatan ditekan, namun selalu mentah oleh pengingkaran negeri Yahudi itu. Bahkan, babak perjanjian damai Oslo 1993 antara Presiden Yasser Arafat dan PM Yitzhak Rabin pun hancur.

Secara terang-terangan Pemerintah Israel mengabaikan kesepakatan damai yang telah dibuat. Duniapun gemas. Amerika Serikat yang diharapkan mampu berperan sebagai mediator yang baik, ternyata tidak ubahnya seperti perusak perdamaian. Negara adidaya itu seolah tak berdaya dan membiarkan perilaku "anak emasnya" mengacau-balaukan semua isi perjanjian damai.

Mereka tidak bertindak ketika seharusnya pasukan Israel meninggalkan Jalur Gaza dan Tepi Barat, tetapi tetap tinggal. Amerika Serikat juga diam ketika kekerasan demi kekerasan menghujani warga sipil Palestina. Namun berbagai upaya untuk mencari jalan keluar lainnya tetap dilakukan.

Berundinglah empat kekuatan dunia yang kemudian dijuluki sebagai kelompok "kwartet". Mereka adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, dan PBB. Tidak ada wakil Arab di sana. Keempatnya berembuk, merumuskan sebuah cetak biru perdamaian bagi kedua negara. Mereka ingin terciptanya negara Palestina merdeka, Palestina yang damai, dan Palestina yang tenteram.

Juga, mengonsepan terbentuknya negara Israel yang sejahtera, tenang, damai, hidup berdampingan, dan diterima seluruh negara Arab. Semua itu tertuang dalam suatu rencana damai yang disebut "*RoadMap*". Intinya, kelompok kwartet mendesak Palestina dan Israel untuk segera menyelesaikan konflik selama dua tahun. Apa yang diharapkan kedua negara itu harus bisa terwujud, sehingga seluruh proses perdamaian di Timur Tengah berjalan lancar.

Salah satu isi *RoadMap* itu adalah Tepi Barat dan Jalur Gaza ditetapkan sebagai bagian wilayah Palestina, dan sedikitnya dua ratus ribu warga Yahudi tinggal di kedua wilayah tersebut. Para pengungsi Palestina diperbolehkan kembali ke kampung halaman mereka. Sementara, Pemerintah Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Israel juga harus merobohkan bangunan yang sudah mereka dirikan. Padahal, *RoadMap* memaksa kedua negara untuk bisa hidup berdampingan dan saling menghormati.

Pada awalnya, Israel tidak mau menerima begitu saja rencana dalam *RoadMap*. PM Ariel Sharon berkali-kali mengatakan keberatan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, khususnya mengenai waktu eksekusi. Israel minta agar waktu seluruh isi *RoadMap* ditunda.

Keempat negara pencetus menolak. Apalagi, Palestina menegaskan tidak mau mengubah klausul yang ada dalam *RoadMap*. Masalahnya sekarang, apakah Israel akan menaati segala perjanjian yang sudah tertuang itu?

Sejarah tak pernah mencatat kenangan indah yang ditorehkan Israel terhadap Palestina. Hampir semua kesepakatan damai dan segala macam resolusi diabaikan Pemerintahan Israel, meski berganti-ganti.

Diterbitkannya rencana perdamaian Israel-Palestina yang dikenal dengan nama “ *RoadMap*“ ini, menandai dimulai kembali proses menuju perdamaian abadi yang selama ini diidam-idamkan. Peta Jalan Damai yang disusun ini, merupakan rencana tiga tahap untuk periode selama 3 tahun.³

Adapun tujuan yang sebenarnya dari Peta Jalan Damai ini adalah menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara tuntas yang akan dicapai pada tahun 2005, membentuk sebuah Negara Palestina yang independen, demokratis serta hidup berdampingan dengan Israel dalam keadaan damai dan aman, juga mengupayakan berakhirnya pendudukan oleh Israel yang dimulai sejak tahun 1967 ketika Tel Aviv merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur dimana ketiga area tersebut menjadi tuntutan rakyat Palestina.⁴

Dalam rangka implementasi Peta Jalan Damai tersebut, kedua belah pihak harus melakukan beberapa hal yaitu Palestina harus melakukan gencatan senjata tanpa syarat yang akan diikuti dengan pembubaran terhadap kelompok-kelompok militan atau organisasi-organisasi garis keras di Palestina, melucuti senjata-senjata mereka, mencegah individu atau kelompok merencanakan dan melakukan

³ Abdul Halim Mahally, *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 384.

⁴ Abduk Halim Mahally, *op.cit*, hal.. 381.

tindakan kekerasan terhadap Israel. Sebaliknya Israel juga harus menghentikan serangan-serangan terhadap warga sipil Palestina dan penghancuran rumah-rumah orang Palestina.

Palestina sebagai bangsa yang selama berlangsungnya konflik selalu menjadi yang tertindas, melalui Mahmoud Abbas tanpa ragu-ragu mau menerima konsep Peta Jalan Damai yang ditawarkan oleh kuartet Internasional, karena salah satu isi dari konsep Peta Jalan Perdamaian yang menyatakan bahwa pada akhirnya melalui Peta Jalan Damai ini, pada tahun 2005 akan terbentuk Negara Palestina merdeka.

Sebenarnya ada dampak negatifnya bagi Palestina terhadap *RoadMap* karena kesepakatan ini juga mirip kesepakatan Oslo yang gagal mendefinisikan hasil final dari proses perdamaian. *RoadMap* samar-samar memetakan bentuk negara Palestina, dengan batas wilayah yang juga “misterius”. Dan mirip kesepakatan Oslo, hanya pihak Palestina yang “dipaksa bekerja keras” menjamin terciptanya perdamaian, untuk memperoleh kemerdekaan yang tidak jelas. Sedangkan Israel selalu “dimaafkan” Kelompok Kwartet (Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia), setiap kali serdadunya dengan seenaknya, melancarkan aksi brutal di kawasan pendudukan.

Wajarlah jika cendekiawan berdarah Palestina yang kini bermukim di Amerika, Edward Said menganggap *RoadMap* bukanlah proyek perdamaian, tapi proyek untuk mengakhiri Palestina sebagai problem bagi Israel dan masyarakat. Pada klausul *RoadMap*, Kalimat “tidak ada kekerasan”, “lebih demokratis”, “pemimpin dan institusi yang lebih baik”, semua itu mengarahkan stigma bahwa

masalahnya terletak pada “brutalnya” perlawanan rakyat Palestina, bukan pada ganasnya aksi pendudukan Israel di wilayah Palestina yang menjadi penyebab perlawanan itu.

Klausul *RoadMap* juga hanya mengharuskan Israel merobohkan pemukiman ilegal Yahudi yang dibangun sejak Maret 2001, ketika Ariel Sharon berkuasa, persisnya terdapat enam puluh perumahan. Sama sekali tidak disebutkan pemukiman lain yang tumbuh sejak tahun 1948 (berdirinya Israel) dan tahun 1967 (perang Arab-Israel), yang jumlahnya hampir dua ratus ribu pemukim Yahudi di Tepi Barat dan jalur Gaza, dan lebih dua ratus ribu pemukim Yahudi di Yerusalem Timur.

Belum lagi soal tidak jelasnya wilayah Palestina, yang berkali-kali dalam klausul itu hanya disebutkan “menetapkan wilayah perbatasan sementara”. Hak warga Palestina atas lebih dari delapan puluh persen wilayahnya yang dirampas Israel sejak tahun 1948 dan tahun 1967, sama sekali tidak disebutkan. Kelompok Kwartet menutup mata, dan menganggap bahwa wilayah Palestina hanyalah di Tepi Barat dan jalur Gaza.

Bahwa menurut argumen Dick Army konsep *RoadMap* tidak perlu di terima oleh Palestina karena beberapa hal :⁵

1. Konsep perdamaian tersebut sejak awal adalah rancangan Amerika Serikat yang notabene merupakan negara yang punya kepentingan politis tertentu untuk menyelamatkan kepentingan Isreal sehingga bagaimanapun juga

⁵ Dick Army : *Road-map to Armageddon?*, IVP, 2004, vol.1, hal 98.

tentu ada agenda-agenda tertentu yang pada akhirnya merugikan negara Palestina.

2. Bagi bangsa Isreal sendiri sudah tertanam bahwa sebagian wilayah Palestina tersebut dianggap sebagai pusat abadi dan eksklusif bagi kaum Israel, dan tidak bisa dibagi-bagi dengan bangsa Palestina. Karena itu, secara strategis pemerintah negara-negara Barat di bawah tekanan Zionis Israel sulit di hentikan.
3. Amerika Serikat bagaimana pun, sebagai satu-satunya adidaya dunia ini, harus tetap dijaga untuk selalu berpihak kepada Israel, kendati pun untuk itu negara adidaya ini harus menggunakan standart ganda dalam semua kebijakan politik, pertahanan dan militernya yang berkaitan dengan dunia Arab Timur Tengah. Jika Amerika Serikat sampai gagal mempertahankan keberpihakannya kepada Negara Israel yang menyebabkan negara ini kalah di mata bangsa-bangsa Arab.
4. Konsep tersebut belum matang sebagai solusi perdamaian karena dari awal juga hanya dinilai daripada tidak ada penyelesaian sebagai pemecah kebuntuan konflik yang tidak kunjung usai.

Namun ada beberapa hal problematik bagi Palestina yang diantaranya :

Pertama, ‘Peta Jalan Perdamaian’ mensyaratkan pembangunan semua gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Artinya, rakyat Palestina dipaksa untuk tidak melakukan perlawanan dan hanya dibolehkan mencari solusi kemerdekaan negaranya lewat jalur “dialog dan perdamaian” yang penuh dengan tipu daya serta kelicikan Amerika Serikat

dan Israel. Pada saat yang sama, Israel sendiri tidak disyaratkan untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Artinya, rakyat Palestina didorong terus untuk berdamai, sementara penjajah Israel dibiarkan terus melakukan pendudukan sekaligus pembantaian rakyat Palestina.

Kedua, walaupun ada syarat perdamaian yang menjadi kewajiban Israel, hal itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pihak Palestina menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Oleh karena itu, ketika ‘Peta Jalan Perdamaian’ gagal diwujudkan, kesalahan pada akhirnya akan ditimpahkan pada pihak Palestina, bukan pada Israel.

Ketiga, syarat-syarat perundingan yang diwajibkan atas pihak Palestina sangat jelas, tetapi tidak pada syarat-syarat yang ditetapkan atas Israel. Dengan begitu, jelas Palestina dapat terus ditekan, sementara Israel tidak.

Keempat, melalui ‘Peta Jalan Perdamaian’ itu, bangsa Palestina diberi janji muluk oleh Amerika Serikat tentang pembentukan negara merdeka Palestina pada tahun 2005. Disebut muluk karena sama sekali tidak dibahas di dalamnya perbatasan negara Palestina merdeka yang dimaksud, para pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara, status kota Jerusalem yang diperebutkan, dan wilayah Palestina yang diduduki para pemukim Yahudi.

C. RUMUSAN MASALAH

Melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dan mewarnai proses perdamaian Israel-Palestina melalui Jalan Perdamaian, maka penulis berusaha

untuk meneliti dengan menarik suatu perumusan masalah tentang “Mengapa Palestina mau menerima konsep Peta Jalan Perdamaian (*The Roadmap for Peace*) Israel Palestina“?

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka teori pada dasarnya dipergunakan untuk membantu kita dalam menetapkan tujuan serta arah penelitian. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi.⁶ Dari pengertian diatas secara mudah dapat dikatakan bahwa teori adalah sesuatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi.

Untuk menganalisa permasalahan seperti diatas kita memerlukan sebuah teori. Adapun teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan Palestina mau menerima upaya damai melalui *RoadMap* Israel-Palestina adalah dengan menggunakan Teori Negosiasi oleh William Zpartman..

Teori Negosiasi oleh William Zpartman

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan, maka penulis menggunakan konsep yang dapat mendekati tulisan dari penulis yaitu teori Negosiasi oleh William Zpartman. William Zpartman memiliki teori bahwa prinsip dasar dalam memulai sebuah dialog untuk mengakhiri konflik adalah memposisikan kedudukan yang sejajar bagi pihak yang berdialog. Artinya bahwa *privelese* atau klaim kebenaran lebih mulia dari bangsa apapun harus ditinggalkan demi terciptanya suatu kesempatan berimbang untuk mewujudkan harmoni di wilayah konflik. Adapun upaya perdamaian haruslah mempunyai aksentuasi

⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES,1990,hal. 185.

terhadap masalah kemanusiaan. Sebagian besar agama dan kebudayaan yang ada di dunia selalu menempatkan masalah kemanusiaan menjadi kartu penting atau seperti ujian penentu apakah layak untuk dianut lebih jauh, artinya bangsa haruslah kembali ke masyarakat untuk berbuat kebajikan.

Teori dasar negosiasi Zartman adalah tentang konsep MHS (*mutual hurting stalemate*). Ialah, negosiasi sebuah kebutuhan jika pihak-pihak yang berkonflik sudah semakin menyadari bahwa dengan terus melakukan konflik maka masing-masing pihak akan mengalami kerugian yang sangat besar, kedua akan saling terluka bahkan bukan tidak mungkin pihak lain yang justru mendapatkan keuntungan dari tetap berlangsungnya konflik. Jika konflik dalam kondisi seperti ini, dalam terminologi Zartman inilah saat yang paling tepat untuk menawarkan proses negosiasi.

Tentang Teori MHS (*mutual hurting stalemate*)⁷

Mutual Hurting Stalemate adalah suatu obyek bergerak, yang pada kenyataannya dan di dalam persepsi, dalam waktu berkala mengalami pergesekan kepentingan diantara kedua objek tersebut dalam hubungannya sebagai dua komponen yang memiliki kesamaan, dan dengan kesamaan tersebut dapat dilakukan penyelesaian perundingan negosiasi setelah sampai pada kematangan konflik. Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya proses konflik yang terjadi dapat disebabkan berdasarkan struktur sosial serta nilai yang dianut oleh masyarakat yang bertikai memiliki kesamaan kepentingan.

⁷ Bloomfield, *Proses-proses Negosiasi*, Jakarta, International IDEA, 2000, hal. 72.

Gagasan utama dari pemikiran ini adalah bahwa jika perang dan kekerasan yang terdapat dalam konflik merupakan suatu hal yang terkonstruksikan secara sosial, maka konsep kekerasan tersebut akan dapat juga didekonstruksi atau dihapus. Dimulai dengan adanya manipulasi institusi oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya konstruksi identitas dalam masyarakat sampai akhirnya menyebabkan masalah kultural dan struktural.

Teori *Mutual Hurting Stalemate* dapat di pahami bahwa persoalan waktu dan kematangan dalam negosiasi dan mediasi di pusatkan pada resolusi konflik apapun metodologi yang digunakan, kapan konflik itu terjadi dan mengapa konflik tersebut terjadi adalah pihak yang telah setuju untuk menyelesaikan konflik barulah bisa di katakan, kematangan teori. Zpartman berpendapat bahwa pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik hanya ketika mereka sudah siap untuk melakukannya.

Ketika negosiasi dipilih menjadi satu alternatif, biasanya semua pihak merasa ini adalah solusi yang tepat untuk mencapai hasil yang memuaskan dan pihak-pihak yang telah merasa bahwa mereka dalam keadaan kembali mendapatkan perdamaian.

Adapun tahapan negosiasi tersebut dapat dilihat dari tahapan yang sebagaimana diatur dalam proses *RoadMap* :

1. Pengakuan terhadap keberadaan Israel

Persyaratan kelompok Kwartet memandang tidak ada harapan bagi solusi dua pemerintahan, kalau pihak yang satu tidak mengakui hak yang

lainnya. Pengakuan terhadap hak keberadaan Israel merupakan persyaratan penting bagi pihak Palestina dalam mencapai perdamaian.

Surat penunjukkan Hamas-Fatah tidak mengandung pengakuan terhadap keberadaan Negara Israel. Bahkan menurut 'Israel' tidak muncul dalam dokumen. Kesepakatan PLO-Israel pun hanya dituliskan 'kesepakatan yang ditandatangani oleh PLO'

Fakta bahwa Hamas tidak mengubah kekerasan pendiriannya pada masalah ini secara mudahnya terlihat seperti yang ditekankan oleh penasehat Ismail Haniyeh, ialah Ahmed Youssef hanya beberapa hari setelah kesepakatan dicapai. Masalah pengakuan ini tidak dibahas di Makkah. Dalam *platform* pemerintahan baru tidak ada tanda-tanda pengakuan akan israel, dengan mengabaikan tekanan dari Amerika Serikat maupun desakan kelompok Kwartet

2. Penghapusan terorisme dan kekerasan

'Kedua negara hidup berdampingan dalam keadaan damai dan aman' tidaklah akan tercapai bila salah satu pihak tetap memprovokasi tindakan teror. Untuk alasan ini, kelompok Kwartet telah berulang kali menekankan bahwa Pemerintahan Palestina segera menghapuskan tindakan terorisme dan kekerasan. Surat penunjukkan yang dibuat tidak menunjukkan penahanan diri terhadap bentuk terorisme dan kekerasan. Justru sebaliknya, surat tersebut mengajak pemerintahan baru berkomitmen pada National Conciliation Document. Dokumen yang akan dicekal ini, secara eksplisit mengakui penggunaan kekerasan dan

terorisme, mengajak tiap partai menegakkan perlawanan bersamaan dengan kegiatan politik dan memimpin serta terlibat dalam perlawanan melawan pendudukan. Tentu saja panggilan tersebut secara langsung kontradiksi pada kewajiban Palestina terhadap kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, termasuk *Roadmap* yang menyebutkan, interalia, penghentian segera terhadap kegiatan bersenjata dan semua tindakan kekerasan terhadap bangsa Israel dimanapun.

Penolakan Hamas terhadap penghapusan kekerasan secara jelas dinyatakan oleh perwakilan Hamas di Libanon, Usama Hamdan : “Setiap orang tahu bahwa kondisi yang diperlukan oleh sebuah pemerintahan dan dimulainya perekonomian adalah dengan mengakhiri kekerasan dan perlawanan. Kami tekankan bahwa perlawanan akan terus dilakukan dan kami telah menyatakannya dalam aksi seperti penangkapan tentara Israel Shalit, dan juga aksi-aksi lain melawan pendudukan yang agresif.

3. Pengakuan terhadap kesepakatan-kesepakatan serta kewajiban-kewajiban sebelumnya, termasuk *Roadmap*.

Kelompok Kwartet telah berulang kali mendesak pemerintahan Palestina manapun Israel agar mau menerima kewajiban dan kesepakatan Palestina sebelumnya, termasuk *Roadmap*. Kesepakatan ini mencerminkan negosiasi sesungguhnya dan persetujuan oleh kedua belah pihak. Tidak ada artinya bekerja sama untuk kesepakatan baru dengan rekan yang mengingkari kesepakatan bersama sebelumnya. Surat penunjukkan

mengajak pemerintahan baru menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani oleh PLO.

Kondisi yang dikeluarkan oleh kelompok Kwartet, yang diterima oleh PLO, bukanlah hambatan untuk mencapai perdamaian, namun menjadi ujian yang paling mendasar. Melalui komunitas internasional dapat dinilai apakah pemerintahan Palestina mampu menjadi rekan dalam menciptakan perdamaian. Sepertinya Palestina keberatan pada negosiasi dan tidak dapat dipuaskan dengan formula samar-samar atau interpretasi yang penuh harapan.

Bagaimana mungkin pemerintahan yang menolak prinsip-prinsip dasar mencapai perdamaian akan menerima pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. Dalam upaya memperoleh perdamaian, ini merupakan situasi yang mengerikan. Merupakan pengkhianatan terhadap para moderat, bagi kedua belah pihak, yang dengan sungguh-sungguh menyakini solusi dua negara membawa konflik dan membawanya pada realita.

E. HIPOTESA

Dari pendekatan kerangka teori di atas, dapat ditarik suatu hipotesa bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Palestina mau menerima konsep Peta Jalan Damai adalah :

1. Ekonomi Palestina akan semakin terpuruk bilamana kesepakatan *Roadmap* tersebut tidak di ambil.

2. Otoritas Palestina akan di kucilkan dalam dunia internasional bilamana *Roadmap* tidak di ambil.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membahas, dan menganalisa data dari berbagai sumber seperti buku, majalah,, jurnal, surat kabar.

2. Teknik analisa

Teknik analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapat akan dianalisa dan digambarkan secara sistematis berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan sehingga sesuai dengan tujuan dan permasalahan penulisan ini.

G. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang melatarbelakangi PLO Menerima Konsep Peta Jalan Perdamaian Israel-Palestina“**, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi bangsa Palestina bersedia menerima konsep Peta Jalan Damai (Road Map), padahal Road Map merupakan konsep perdamaian yang hampir sama dengan perjanjian-perjanjian yang pernah ada sebelumnya di Palestina yang selalu saja gagal total dalam rangka meredam konflik antara bangsa Palestina dan Israel.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis, diawali dengan melihat latarbelakang dilakukannya upaya damai Israel-Palestina setelah kegagalan kesepakatan Camp David II sampai terjadinya konflik di Masjid Al-Aqsha (28 September 2000) yang pada akhirnya memunculkan upaya perdamaian melalui konsep Peta Jalan Menuju Perdamaian di kawasan Timur Tengah atau yang dikenal dengan nama “*The Roadmap for in the Midlle East*“ pada tahun 2003. (Tahun 2000 sampai akhir tahun 2003).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasannya, penelitian ini akan dipaparkan dalam beberapa bab:

- Bab I Pendahuluan yang berisikan: Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Metodologi Peneleitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Dinamika Konflik dan Penyelesaian Konflik Palestina-Israel
- Bab III Dilema Penerimaan *Roadmap* Oleh Palestina
- Bab IV Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Palestina Menerima *Roadmap* Israel-Palestina.
- Bab V Kesimpulan
- Lampiran